



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-129.KP.10.02 TAHUN 2023

TENTANG

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK, PEMERIKSA PATEN,
DAN PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, dan Pemeriksa Desain Industri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jenjang Jabatan Fungsional Ahli Madya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, dan Pemeriksa Desain Industri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 998);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1307);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1340);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK, PEMERIKSA PATEN, DAN PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-129.KP.10.02 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Februari 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	RIFAN FIKRI, S.T. NIP. 198001092009121005	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Paten Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Paten Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	871
2.	FAISAL NARPATI, S.T., M.T. NIP. 198304252009121005	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Paten Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Paten Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	819
3.	MUHAMMAD NUR ICHWAN M., S.T. NIP. 198501072009121003	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Paten Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Paten Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	715
4.	YUSTINA LINASARI, S.T., M.T. NIP. 198304152012122003	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	735
5.	SARTONO, S.H. NIP. 197412221998031001	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	500
6.	TRIADHY SETYO P, S.Sos., M.I.Kom. NIP. 197903142009121003	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	471
7.	FAJAR HERI NUGROHO, S.H. NIP. 198012222006041001	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	471
8.	BUDI PRAKOSO, S.E., M.Si. NIP. 197102261991031001	Pembina (IV/a)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	468

1	2	3	4	5	6
9.	KELLY ANTONIO F, S.Kom., M.Si. NIP. 197811132005011001	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	463
10.	FITRIADI PRAMONO, S.T. NIP. 198008152010121004	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	459
11.	LILIK BUDIANTO, S.S. NIP. 198008312009121003	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	454
12.	FADLY LATIEF, S.Kom. NIP. 198107032005011001	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	438
13.	MIRNA PRIMAYANI, S.H., M.H. NIP. 198201272005012002	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Merek Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Merek Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	413
14.	RIZKI HARIT MAULANA, S.Ds., M.P.P. NIP. 198301312009011004	Penata Tk.I (III/d)	Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	461



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY